

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT**

Nursyahbandi  
NPP. 31.0755

*Asdaf Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: [31.0620@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0620@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing : Isman Hadijaya, S.AP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background:** *The author focuses on the problem of tourism, namely the non-optimal management of tourism such as limited resources and infrastructure as well as the lack of public awareness about the importance of maintaining tourist attractions in Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province. **Objectives:** The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of tourism policies is carried out and overcome the factors that become supporters and obstacles in the policy implementation process. **Methods:** This research uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches, the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** Based on the results of field research, it can be concluded that the Implementation of the Sumbawa Regency Tourism Master Plan Policy has been running well, but in the process it still has to be carried out with seriousness and commitment from the Sumbawa Regency Regional Government. **Conclusion:** The Regional Government of Sumbawa Regency is expected to further utilize the existing potential so that tourism is more advanced so that it can increase the development and development of the tourism sector which in turn can improve the welfare of the community and the regional economy.*

**Keywords:** *Implementation, Local Government, Tourism*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Penulis berfokus pada permasalahan pariwisata yaitu belum optimalnya pengelolaan pariwisata seperti terbatasnya sumber daya dan sarana prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga objek wisata di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan kepariwisataan dilaksanakan dan mengatasi factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Sumbawa sudah berjalan baik, namun dalam prosesnya masih harus dijalankan dengan keseriusan dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. **Kesimpulan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat lebih memanfaatkan potensi yang ada agar pariwisata semakin maju sehingga dapat meningkatkan Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pemerintah Daerah, Pariwisata

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia, dengan pengembangan wilayah sebagai pendukung utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pariwisata adalah salah satu sektor yang memberikan pemasukan finansial yang besar bagi negara dan yang menjadi penunjang pariwisata yaitu pengembangan wilayah, dimana pengembangan wilayah merupakan suatu cara yang mendorong wilayah melalui pendekatan komprehensif yang meliputi berbagai aspek diantaranya: aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek fisik. Dari ketiga aspek ini termasuk faktor penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Wahyuningsih (2020).

Implementasi kebijakan pariwisata merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang kompleks dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyelesaian isu-isu publik. Kepariwisata melibatkan interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha, serta membutuhkan kebijakan yang terencana dan diimplementasikan dengan baik. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah salah satu jenis kebijakan publik. Kebijakan sendiri adalah suatu serangkaian kegiatan/tindakan yang diusulkan untuk dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut pendapat Dye seperti yang dikutip oleh Abidin dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik menyebutkan bahwa kebijakan adalah sebuah pilihan dari pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pariwisata alami yang menarik perhatian wisatawan, khususnya Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan memiliki peraturan terkait pengembangan pariwisata. Sarana dan prasarana, anggaran pembiayaan, serta komitmen pemerintah merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengelola sektor

pariwisata dengan baik melalui peraturan daerah yang mengatur kegiatan pariwisata di wilayah tersebut. Menurut informasi yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata, terdapat 57 orang pegawai yang terdiri dari 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Aparatur sipil negara tersebut harus mampu bekerja dengan optimal agar hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa. keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatur yang terlibat dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia aparatur menjadi prioritas penting dalam upaya mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Sementara itu dalam Hermawan & Heri (2008) untuk anggaran pembiayaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sebagai pondasi berjalannya seluruh rangkaian kegiatan yang diatur sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemangku kepentingan. Komitmen pemerintah mempunyai peranan kunci terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan dibidang pariwisata. Kuat lemahnya derajat komitmen pemerintah suatu Negara dalam pembangunan pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata.

Mahdayani (2009) Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sumbawa saat ini belum mencapai tingkat optimal karena masih kesulitan mencapai sasaran yang diharapkan, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata serta promosi pariwisata. Meskipun telah dilakukan upaya, hasil yang diharapkan belum tercapai dengan baik.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan pariwisata dibandingkan dengan banyaknya destinasi pariwisata yang ada. Hal ini menyebabkan kurangnya kapasitas untuk mengelola destinasi pariwisata secara efektif dan efisien. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan destinasi wisata dan promosi pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Sarana yang kurang memadai dapat menghambat pengembangan dan promosi destinasi pariwisata secara maksimal.

Selain itu, realisasi anggaran yang belum efisien dalam program pengelolaan pariwisata turut mempengaruhi kinerja dan hasil dari upaya pengelolaan pariwisata di daerah ini. Pemanfaatan anggaran yang tidak optimal dapat mengurangi efektivitas dari program-program yang telah direncanakan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata juga menjadi kendala serius. Edukasi yang lebih intensif dan kampanye yang terstruktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keindahan dan keberlanjutan objek wisata di Kabupaten Sumbawa.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan kepariwisataan maupun konteks peran Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Penggunaan hasil penelitian sebelumnya adalah salah satu upaya peneliti untuk menambah sumber pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1. Penelitian Kariaman dan Amri berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Kariaman & Amri, 2020), menemukan bahwa Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai belum terkordinasi dengan baik sehingga menghambat upaya pengembangan pariwisata sebagaimana aspek-aspek pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Pantai Cermin yang dilakukan melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana konsep *Good Governance* kurang maksimal karena antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan masih berjalan sendiri-sendiri karena kurangnya komunikasi dan kordinasi.
2. Penelitian Anhar dkk menemukan bahwa Strategi dalam pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Aceh Selatan yaitu meritalisasi dan optimalisasi objek destinasi wisata, menggelar event dalam menunjang pariwisata dan peningkatan PAD sector pariwisata. Namun starategi tersebut belum berjalan secara maksimal karna terdapat hambatan yaitu masih rendahnya kualitas dan kurangnya kuantitas sumber daya manusuia sehingga fungsi kinerja aparatur tidak maksimal oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengajukan untuk pembangunan sarana prasarana destinasi wisata Aceh Selatan kepada Kementrian Pariwisata Republik Indonesia dan kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk peningkatan sumber daya manusia kelembagaan dan masyarakat sekitar objek wisata. (Anhar dkk, 2021).
3. Penelitian Krisna dan Suryasih menemukan bahwa Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengambil langkah yaitu dengan memfasilitasi daya tarik wisata dengan melakukan perbaikan fasilitas penunjang kepariwisataan, mempromosikan daya tarik wisata Pura Kehen dengan media promosi online dan offline, serta melakukan pembinaan pada kelompok sadar wisata tentang kepariwisataan dan menekankan pentingnya sapta pesona dalam pengembangan daya tarik wisata. (Krisna & Suryasih, 2018).
4. Penelitian Agnes menemukan bahwa Dalam usaha untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam pengembangan pariwisata nasional yang dimana untuk meningkatkan sumber daya alam buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus dari pemerintah untuk mengelola kepariwisataan. Strategi pengembangan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan pariwisata disusun atas dasar analisa

lingkungan serta visi, misi dan tujuan organisasi/perusahaan dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Poso. (Agnes, 2021)

5. Penelitian Novitri Daeng (2023) dengan judul Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Akeshu di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam pengembangan potensi Pengembangan Ojek Wisata Pantai Akeshu yaitu menjadi motivator yaitu dengan cara melakukan promosi serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membuat peran motivator sudah terlaksana dengan baik. Sebagai fasilitator melakukan pengembangan sarana dan prasarana dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk membangun sarana prasarana seperti pembuatan jalan namun, pembangunan fasilitas belum berjalan sepenuhnya sehingga membuat indikator fasilitator belum terlaksana dengan baik. Sebagai dinamisator Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dengan membentuk kelompok sadar wisata sebagai bentuk kerja sama dengan masyarakat dan swasta.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Kariaman dkk, Anhar dkk, Krisna dan Suryasih, dan Agnes. Selain itu pengukuran/indicator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat Prof Muchlis Hamdi (Hamdi, 2014) yang menyatakan bahwa indicator keberhasilan implementasi menyangkut dinamika produktivitas, linearitas dan efisiensi.

Produktivitas melibatkan pendengaran, kemampuan untuk mewujudkan pencapaian standar yang telah ditentukan, terutama berupa pencapaian standar bagi populasi kelompok sasaran. Semakin lancar akses terhadap kelompok sasaran, semakin efektif implementasi kebijakan. Linearitas mengacu pada kepatuhan terhadap prosedur kepatuhan standar dengan instruksi khusus dari spesifikasi standar. Kecukupan ini menyangkut prosedur, tenggat waktu, biaya, lokasi dan pelaksana. Semakin konsisten proses pemenuhan standar dalam implementasi kebijakan, maka semakin linier pula implementasi kebijakan tersebut. Efisiensi mengacu pada kemampuan menggunakan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa aktor, aset, dana, dan teknologi. Semakin minim penggunaan pelaksana, aset, dan dana melalui penggunaan teknologi yang lebih tepat dalam implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan, maka dapat dikatakan implementasi kebijakan akan semakin efektif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Creswell (2016:161) mengemukakan bahwa *“Research as key instruments. Qualitative researcher collect their own data through documentation, observation, or interview with the participant.”* Maksudnya bahwa peneliti adalah kunci dari instrument penelitian. Penelitian kualitatif mengumpulkan data masing-masing berupa dokumen, observasi, atau wawancara. Dalam penelitian kualitatif, informasi diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berkelanjutan hingga informasi tersebut menjadi lengkap.

Simangunsong (2017:215) menjelaskan bahwa dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, Focus Group Discussion, dan teknik-teknik ini dapat digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumen. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Bupati Sumbawa, DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekda Kabupaten Sumbawa, Asisten Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas, Kepala Kabid Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pendidik.

Pentingnya analisis data dalam metode ilmiah tidak bisa diabaikan, karena melalui proses ini, data dapat diinterpretasikan dengan tujuan mengatasi masalah dalam penelitian. Awal dari analisis data adalah pengkajian data dari berbagai sumber, dan tahap ini sangat krusial karena data harus dikelola dan dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Simangunsong (2017:226) menjelaskan bahwa aktivitas analisis data harus berlangsung secara berkelanjutan hingga selesai, melalui beberapa tahap pertama *data reduction* (reduksi data) yaitu data yang sudah ada di seleksi dengan focus pada penyederhanaan dan abstraksi, kedua *data display* (Penyajian data) yaitu Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara grafik dan kategori. Ini akan memudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi, karena data telah diatur dan diatur dalam pola relasional, sehingga dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi obyek yang dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan konsep teori implementasi yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi dalam bukunya Kebijakan Publik (Proses, Analisis, Dan Partisipasi) (2014:49) menyatakan bahwa pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dua dimensi utama yaitu, indikator dan determinan.

Dari pembahasan yang akan dibahas penulis maka akan didapatkan dan diketahui bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis akan

membahas dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata dalam proses implementasi kebijakan di Kabupaten Sumbawa serta upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat Kinerja DISPOPAR dalam meningkatkan kepariwisataan sesuai dengan rencana induk kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi melalui peninjauan langsung ke kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa.

Disamping itu juga mengunjungi kantor Lembaga lainnya yang relevan dengan penelitian yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Sekretariat Dewan Kabupaten Sumbawa. Sementara itu untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen milik Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa dan sumber tertulis lainnya.

### **3.1 Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan pilihan di bidang pariwisata. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses administratif yang memungkinkan konsep-konsep kebijakan yang telah dirumuskan secara teoritis untuk dijalankan dalam praktik di lapangan. Proses ini melibatkan rangkaian kegiatan yang terorganisir dengan baik, mulai dari alokasi sumber daya hingga pengaturan struktur organisasi yang efisien.

#### **3.1.1 Produktivitas**

Produktivitas merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan output yang diinginkan. Konsep produktivitas dalam teori implementasi mengacu pada efisiensi penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan modal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui berbagai strategi, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pengembangan proses kerja yang efisien, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal. Dalam konteks implementasi kebijakan atau program, produktivitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan produktivitas menjadi langkah krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan atau program secara efektif.

#### **3.1.2 Linearitas**

Konsep linearitas merujuk pada hubungan yang proporsional antara input dan output dalam suatu sistem atau proses implementasi. Ide dasar di balik linearitas adalah bahwa perubahan dalam jumlah input akan menghasilkan perubahan yang sebanding dalam output yang dihasilkan. Dalam konteks implementasi kebijakan atau program, konsep linearitas dapat diterapkan untuk memprediksi bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu, seperti alokasi anggaran, jumlah tenaga kerja, atau tingkat

dukungan masyarakat, akan memengaruhi hasil yang diharapkan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, implementasi seringkali kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait, sehingga keberadaan hubungan linear tidak selalu terjamin. Meskipun demikian, pemahaman tentang konsep linearitas dapat membantu para pembuat kebijakan dan praktisi implementasi untuk membuat perkiraan yang lebih baik tentang dampak dari keputusan dan tindakan yang mereka ambil dalam proses implementasi.

### **3.1.3 Efisiensi**

Efisiensi memegang peran kunci dalam teori implementasi sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana sumber daya yang digunakan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks implementasi kebijakan atau program, efisiensi mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan jumlah sumber daya yang minimal. Hal ini melibatkan pengelolaan yang bijaksana terhadap waktu, tenaga kerja, dana, dan sumber daya lainnya untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Pendekatan yang efisien dalam implementasi tidak hanya membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga dapat mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat pencapaian tujuan. Untuk mencapai efisiensi dalam implementasi, penting untuk melakukan perencanaan yang cermat, pengelolaan yang teliti, serta evaluasi yang terus-menerus terhadap proses dan hasil implementasi. Dengan demikian, efisiensi menjadi salah satu aspek penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan atau program dengan sukses dalam teori implementasi.

## **3.2 Determinan Implementasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Dalam proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan, terdapat sejumlah determinan yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Faktor-faktor ini meliputi dukungan politik dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, koordinasi yang efektif antarlembaga dan lintas sektor, ketersediaan sumber daya yang memadai baik dalam hal finansial, manusia, maupun infrastruktur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pariwisata.

### **3.2.1 Substansi Kebijakan**

Hal ini mencakup kesesuaian antara tujuan, strategi, dan langkah konkret yang tercantum dalam rencana tersebut dengan kebutuhan dan realitas di lapangan. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan visi jangka panjang pembangunan pariwisata, serta memberikan landasan yang kuat bagi pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan implementasi kebijakan kepariwisataan di dasari oleh tiga kebijakan yaitu Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumbawa, dan Perbup Sumbawa Nomor 68 Tahun 2020 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Ketiga kebijakan tersebut dapat saling melengkapi dan berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang sama dari tiap kebijakan tersebut.



### **3.2.2 Perilaku Tugas Pelaksana**

Motivasi kerja yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa sudah berjalan baik. Para pegawai menjalankan tugas yang telah ditentukan pada masing-masing individu dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar. Pegawai juga saling membantu untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan agar dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Kemampuan pembelajaran yang dimiliki oleh pegawai atau pelaksana di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa sudah baik. Mengadaptasi diri dengan kebutuhan baru dan menemukan peluang perbaikan para pegawai telah memiliki kemampuan ini, dilihat dari pengembangan yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan kepariwisataan yang di terapkan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa.

### **3.2.3 Interaksi Jejaring Kerja**

Kerja sama antar pelaksana terjalin dengan baik, para pegawai bekerja sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan para pegawai melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kerjasama juga terjadi antara pelaksana dan pembuat kebijakan untuk mewujudkan kebijakan yang memberikan dampak positif yang lebih untuk masyarakat.

### **3.2.4 Partisipasi Kelompok Sasaran**

Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan atau terhadap implementasi kebijakan kepariwisataan sudah berjalan dengan baik. Tujuan dari implementasi kebijakan sebagian tercapai seiring dengan berjalannya waktu. Masyarakat dan pemerintah sudah mulai menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat destinasi pariwisata serta mereka jugalah yang akan merasakan dampak positif dari kepariwisataan tersebut.

### **3.2.5 Sumber Daya**

Kecukupan dana pada pelaksanaan kebijakan kepariwisataan sudah berjalan baik. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa memberikan anggaran untuk dapat mengembangkan kebijakan ini, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa memanfaatkan dengan baik anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan peralatan penunjang pengembangan kebijakan kepariwisataan internal maupun eksternal.

Ketersediaan pelaksana dalam implementasi kebijakan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa, terkhususnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa telah cukup baik. Peningkatan jumlah pegawai yang berada di dinas tersebut sangat membantu masyarakat. Terutama pegawai yang berlatar belakang kepariwisataan sangat membantu kinerja pegawai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa.

Kecukupan peralatan yang dimiliki Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa sudah dapat dikatakan lengkap dan memadai untuk mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa memiliki peralatan yang diantaranya infrastruktur

pariwisata, seperti transportasi, akomodasi, dan sarana pendukung lainnya, serta teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk meningkatkan promosi dan manajemen pariwisata.

Ketersediaan informasi mengenai implementasi kebijakan kepariwisataan masih kurang, beberapa masyarakat masih belum mengetahui tentang kebijakan tersebut. Akan tetapi, pelaksana sudah memberikan sosialisasi kebijakan di media sosial atau secara langsung kepada petugas kecamatan. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap informasi-informasi terbaru yang membuat terhambatnya implementasi kebijakan kepariwisataan.

### **3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat**

#### **3.3.1 Upaya Langsung**

Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan kebijakan internal, dan kurangnya koordinasi antarbagian dalam organisasi dapat menjadi tantangan serius yang memperlambat atau bahkan menghambat proses implementasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta memperbaiki koordinasi dan komunikasi antarunit atau departemen terkait.

Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, ketidakpastian ekonomi, dan resistensi dari pihak-pihak eksternal bisa menjadi hambatan serius dalam proses implementasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu diambil langkah-langkah konkret seperti advokasi kebijakan yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan pariwisata, kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti LSM, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan, serta kerja sama lintas-sektor dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperoleh dukungan dan koordinasi yang diperlukan.

#### **3.3.2 Upaya Tidak Langsung**

Upaya mengatasi faktor penghambat secara tidak langsung internal dalam proses implementasi kebijakan rencana induk pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan. Faktor-faktor seperti resistensi perubahan budaya organisasi, kurangnya kepemimpinan yang efektif, dan ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi dapat memperlambat atau menghambat proses implementasi kebijakan. Para pemangku kepentingan dalam mengatasi faktor penghambat secara tidak langsung internal yaitu dengan pihak pemerintah daerah sendiri harus memastikan para pelaksana kebijakan mendukung kebijakan tersebut dan terus meningkatkan dan mengembangkan para pegawai selaku pelaksana kebijakan.

Faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi global, perubahan iklim, dan konflik sosial di wilayah tertentu dapat menjadi hambatan tidak langsung yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata secara eksternal. Para pemangku kepentingan dalam mengatasi faktor penghambat secara tidak langsung eksternal yaitu dengan pihak pemerintah daerah harus memastikan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap proses implementasi kebijakan melalui komunikasi dan sosialisasi kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam Pelaksanaan implementasi kebijakan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa, khususnya pariwisata yang dimiliki Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. kebijakan tersebut mulai ditetapkan pada tanggal 26 November 2018. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu masalah yang ditemukan. Dimulai dari masalah koordinasi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dan strategi khusus dalam mengelola kepariwisataan. Implementasi kebijakan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan itu dalam pelaksanaannya telah dapat membantu mengurangi permasalahan kepariwisataan terutama dalam hal perawatan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki sudah cukup lengkap. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang belum mengerti betapa pentingnya menjaga dan merawat objek wisata.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Implementasi kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat harus benar-benar dilaksanakan. Dalam waktu berjalan, dampak yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya yaitu peningkatan sumber penerimaan daerah itu sendiri dan masyarakat khususnya dapat meningkatkan pendapatannya sendiri dan meningkatkan kualitas ekonomi setiap individu serta alam Sumbawa lebih terjaga dan dikenal oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

## **IV. KESIMPULAN**

Dari kesimpulan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, maka dapat ditarik beberapa poin yang dapat dipedomani yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No.6 Tahun 2018, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, proses pengelolaan pariwisata belum mencapai tingkat efektivitas dan keberhasilan maksimal. Berbagai kendala terjadi, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, fluktuasi dana yang tidak stabil setiap tahunnya, serta minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga objek wisata.
2. Faktor pendukung dan penghambat yaitu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah sangat vital, termasuk alokasi sumber daya dan dukungan anggaran yang memadai. Kedua, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga objek wisata juga sangatlah penting. Ketiga, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dalam manajemen pariwisata, pemasaran, dan pengelolaan destinasi akan sangat mendukung proses ini. Selain itu, infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, transportasi, dan akomodasi, akan meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata. Terakhir, kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, industri pariwisata, dan sektor swasta lainnya akan mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses

implementasi kebijakan tersebut. Pertama, terbatasnya sumber daya, baik dalam hal dana, sumber daya manusia, maupun sumber daya penunjang lainnya, dapat menjadi kendala serius. Kedua, infrastruktur yang kurang memadai, terutama akses jalan menuju setiap objek wisata, bisa menghambat pengembangan pariwisata. Selain itu, kurangnya sosialisasi dalam pemasaran pariwisata juga menjadi masalah, karena promosi yang kurang efektif dapat mengurangi minat wisatawan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga serta mengembangkan potensi wisata yang ada.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa aktif menjalin koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah juga mulai mengadakan pelatihan guna meningkatkan kualitas pegawai sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Selain langkah-langkah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa juga melakukan upaya lain untuk mendukung pengembangan pariwisata. Mereka terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk industri pariwisata dan komunitas lokal, guna memastikan keselarasan dalam upaya pengembangan destinasi wisata. Selain itu, mereka juga mengadakan kampanye sosial dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian objek wisata serta mengoptimalkan potensi yang ada.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya berfokus pada salah satu pelaksana implementasi kebijakan kepariwisataan yaitu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan kepariwisataan khususnya rencana pembangunan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, Misbahul., dkk. (2021). Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pengembangan Pariwisata. Vol 6 No 2: Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/17021>
- Creswell, J. W. (2002). *Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK.
- Daeng, Novitri. (2023). *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam*

- Pengembangan Objek Wisata Pantai Akesahu di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.* Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14359>
- Hamdi, Muclhlis. (2014). *Kebijakan Pubulik.* Kota Ghalia Indonesia.
- Hermawan, & Heri. (2008). *Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonesia.* *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, 3(1).  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=108147&lokasi=lokal>
- Krisna, N. P., dkk. (2018). *Upaya Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Daya Tarik Wisata Pura Kehen Kabupaten Bali.* Vol 6 No 1: *Jurnal Destinasi Pariwisata.* Universitas Udayana.  
[10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p03](https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p03)
- Mahdayani. W., 2009. *Buku Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata.* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias Selatan
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2028
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025
- Simanggungsong, Fernandes. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan.* Alfabeta.
- Sinaga, Kariaman., dkk. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.* Vol 8 No 1: Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik.* Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo.  
<https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.163>
- Veronika, Agnes. (2021). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Danau Poso Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Poso.* Universitas Hasanuddin.  
<http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/11983>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuningsih, S. dkk. 2019. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apalarang Sebagai Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba.* *Jurnal Profitability Fakultas Dan Bisnis, Vol 3, No 1:* Universitas Muhammadiyah Makassar.